

# PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENDORONG PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN<sup>1</sup>

Oleh : Utari Putri Sunaryo<sup>2</sup>

## ABSTRAK

*Desa adalah unit penyelenggaraan pemerintah yang paling kecil maka (secara teoritis) terbuka untuk mewujudkan gagasan demokrasi langsung. Upaya pemerintah desa dalam pembangunan desa secara bottom up pada hakekatnya tidak lain dari suatu upaya politik developmentalism di desa, yang penyelenggaraannya ditekankan pada dua aspek yaitu pertama, menciptakan ruang atau peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan dirinya; kedua, mengupayakan pemberdayaan masyarakat agar mampu memanfaatkan ruang/peluang yang tercipta (Bintarto, 1989 : 13-15). Desa Kema III, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara merupakan salah satu desa yang cukup baik dalam memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam politik didesa, hal ini dilihat dari partisipasi politik masyarakat yang meningkat sebanyak 80%. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga masih ada sedikit masyarakat yang belum memahami secara detail mengenai partisipasi politik dan dampaknya bagi pembangunan desa yang diakibatkan oleh kurangnya sumberdaya yang ada di desa Kema III. Perlu diidentifikasi penyebabnya agar ditemukan solusi untuk mengatasinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan deskriptif analisis. Konsep yang dipakai dalam penelitian ini adalah konsep dari Club du Sahel dalam Mikkelsen (2003) yang memberikan penjelasan tentang partisipasi politik menggunakan beberapa pendekatan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.*

**Kata Kunci : Peran Pemerintah Desa, Partisipasi Politik Masyarakat, Pembangunan.**

## ABSTRACT

*The village is the smallest unit of government administration then (theoretically) open to realizing the idea of direct democracy. The efforts of the village government in bottom-up village development are essentially none other than a political effort of developmentalism in the village, the implementation of which is emphasized on two aspects: first, creating space or opportunities for the community to develop themselves; second, to strive for community empowerment to be able to utilize the space / opportunities created (Bintarto, 1989: 13-15). Kema III Village, Kema District, North Minahasa Regency is one of the villages that is quite good in providing space for the community to participate in village politics, this is seen from the political participation of the community which increased by 80%. But it is also possible that there are still a few people who do not understand in detail about political participation and its impact on village development due to a lack of resources in the village of Kema III. Need to be identified the cause in order to find a solution to overcome them. This research uses a qualitative research method, with a descriptive analysis approach. The concept used in this study is the concept of Club du Sahel in Mikkelsen (2003) which provides an explanation of political participation using several approaches to increase public participation.*

**Keywords: Role of Village Government, Community Political Participation, Development**

## PENDAHULUAN

Dengan hadirnya Undang-undang No 6 Tahun 2014, Pemerintah desa selaku penyelenggara pemerintahan desa memiliki ruang gerak atau kewenangan yang cukup luas dalam mengatur dirinya sendiri yang tentunya berasaskan: rekognisi, subsidiaritas, keberagaman, kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan dan keberlanjutan. Asas ini tertuang dalam pelaksanaannya mulai dalam hal merencanakan pembangunan Desa,

---

<sup>1</sup> Merupakan skripsi penulis

<sup>2</sup> Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT Manado

pengaturan keuangan, pengaturan keuangan yang di maksud adalah pengaturan keuangan yang mandiri walaupun dalam hal ini tetap mendapatkan pengawasan dari pemerintah dalam hal ini pemerintah kabupaten, kemandirian pengaturan yang di maksud adalah pemerintah desa berhak menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) yang didalamnya juga mengatur cara desa mendapatkan dana dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), hingga pembinaan dalam hal ini pemberdayaan terhadap masyarakat.

Perhatian pembangunan perlu diarahkan kepada pembangunan pedesaan dengan segala aspeknya, karena titik tumpu pembangunan masyarakat Indonesia berada di pedesaan. Tetapi semuanya berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada saat ini. Keadaan yang demikian ini diperkuat oleh adanya kenyataan bahwa masyarakat pedesaan masih diliputi dengan masalah kemiskinan, keterbelakangan dan berbagai kerawanan sosial lainnya. Perlu usaha yang terencana untuk membangun prasarana perhubungan desa, produksi, pemasaran dan prasarana desa untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya mempunyai hambatan dan permasalahan. Hambatan dan permasalahan tersebut antara lain meliputi : rendahnya tingkat pendidikan masyarakat yang menyebabkan kurangnya sumberdaya manusia perangkat desa, dimana rata-rata tingkat pendidikan terakhir masyarakat yaitu lulusan SMP. Kurangnya sarana dan prasarana kerja, serta penghasilan yang masih rendah.

Kita memahami bahwa pembangunan dibutuhkan untuk memecahkan berbagai masalah seperti kemiskinan, kesenjangan sosial, dan pengangguran. Berbicara tentang kesejahteraan erat kaitannya dengan Politik, karna tujuan dari politik adalah untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri, dengan demikian pemahaman tersebut maka masyarakat harus menghadirkan adanya kritik maupun kontrol terhadapnya karena pada prinsipnya kehadiran pembangunan dapat diasumsikan sebagai satu-satunya cara untuk dapat memecahkan masalah dapat berbalik fakta, seperti adanya kesenjangan sosial-ekonomi, politik dan kebudayaan.

Bertitik tolak dari permasalahan tersebut, dibutuhkan keterlibatan aktif dan keseriusan dari pemerintahan setempat baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, kecamatan maupun pemerintah desa. Dalam memainkan perannya dalam pembangunan desa, dalam proses penanggulangannya dan pemerintah juga harus melihat setiap kebijakan-kebijakan yang akan diimplementasikan atau yang akan dilaksanakan, baik itu berupa peraturan perundang-undangan, maupun melalui peraturan daerah yang akan dikeluarkan maupun yang akan dijalankan. Sedangkan masyarakat sendiri yang akan diposisikan untuk menilainya apakah kebijakan-kebijakan tersebut dapat dikatakan sebagai salah satu pemecahan masalah ataukah sebaliknya dapat menimbulkan masalah baru lagi dalam pembangunan tersebut. Pentingnya peran masyarakat dalam ikut serta memberikan sumbangsih pikiran dan tenaga sebagai bagian dari partisipasi politik dalam program-program pemerintah desa.

Desa Kema III juga sebagai Desa otonom yang berada di wilayah pesisir Minahasa Utara memiliki permasalahan yang sama dalam hal partisipasi politik masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur desa, terutama dalam hal partisipasi politik yang menurut Almond bagian dari partisipasi politik masyarakat, membentuk kelompok kepentingan serta membangun komunikasi individual dengan pejabat politik dan administratif adalah pemerintah desa juga perlu melakukan peran-peran pendekatan terhadap masyarakat untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan, seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Nomor 47 tahun 2016 tentang administrasi pemerintahan desa.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Konsep Peran**

Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” menyebutkan peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. Menurut Abu Ahmadi (1982) peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2002:243), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari hal diatas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara total enforcement, yaitu penegakan hukum secara penuh.

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama. Syarat-syarat peran mencakup 3 hal, yaitu :

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.
3. Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan.

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran (*role*). Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan. Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas ada baiknya terlebih dahulu kita pahami tentang pengertian peran, (Miftah Thoha, 1997).

Dari beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Berdasarkan hal-hal diatas dapat diartikan bahwa apabila dihubungkan dengan dinas perhubungan, peran tidak berarti sebagai hak dan kewajiban individu, melainkan merupakan tugas dan wewenang.

## **B. Konsep Pemerintah Desa**

### **• Pengertian Pemerintah Desa**

Pemerintahan desa merupakan bagian dari pemerintahan nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Lebih lanjut Pemerintahan Desa berdasarkan PP No. 47 Tahun 2015 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 ayat (2) PP No. 47 Tahun 2015).

Pemerintahan desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah Desa atau disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa (Rudy,2008).

### **• Kepala Desa**

Kepala Desa adalah pemimpin dari desa di Indonesia. Kepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa. Masa jabatan kepala desa 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Kepala desa tidak bertanggung jawab kepada camat, namun hanya dikoordinasikan saja oleh camat. Berdasarkan pengertian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud kepala desa adalah seseorang yang bertugas menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Kewenangan dan/atau Fungsi Kepala Desa Dalam melaksanakan tugas kepala desa pada Pasal 26 ayat (2), Kepala Desa berwenang :

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.
3. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa.
4. Menetapkan peraturan desa.
5. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa.
6. Membina kehidupan masyarakat desa.
7. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.

8. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa.
9. Mengembangkan sumber pendapatan desa.
10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa.
12. Memanfaatkan teknologi tepat guna.
13. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
14. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Desa dilarang menjadi pengurus partai politik (namun boleh menjadi anggota partai politik), merangkap jabatan sebagai ketua atau anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan, merangkap jabatan sebagai anggota DPRD, terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah.

- **Perangkat Desa**

Perangkat Desa terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Perangkat desa bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dengan demikian, perangkat desa bertanggungjawab kepada kepala desa. Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Ada pun tugas dan wewenang dari perangkat desa adalah membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya

Sekretariat Desa dipimpin oleh sekretaris desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi desa, membantu persiapan penyusunan peraturan desa dan bahan untuk laporan penyelenggara pemerintah desa serta melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala desa. Pelaksana teknis desa merupakan unsur pembantu kepala desa yang dibantu oleh 3 (tiga) kepala seksi dan mengurus bidang operasional atau sesuai bidang urusannya masing-masing, diantaranya dibidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, dan pelayanan. Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala Desa dalam mengurus wilayah yang sering disebut dengan kepala dusun. Kepala dusun mempunyai peranan penting dalam hal pengawasan pembangunan diwilayah kerjanya masing-masing. Ketentuan mengenai perangkat desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 ayat 2 pasal 2 yang berbunyi perangkat desa terdiri atas sekretariat desa, pelaksana teknis, dan pelaksana kewilayahan.

Berdasarkan penjelasan diatas Peneliti dapat menyimpulkan bahwa perangkat desa adalah bagian dari pemerintah desa yang diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota dan perangkat desa bertanggungjawab kepada kepala desa dalam membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

- **Badan Permusyawaratan Desa**

Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. Anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Berdasarkan pengertian diatas, Peneliti dapat menyimpulkan bahwa struktur pemerintahan desa adalah susunan secara sistematis pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa dan BPD.

Adapun tugas dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Dari tiga tugas diatas sudah jelas BPD adalah lembaga yang memiliki kekuatan dalam menyepakati peraturan desa yang bakal menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan desa. BPD juga sekaligus memiliki kekuatan untuk mengawasi proses pembangunan desa dalam seluruh aspek. Ini menunjukkan betapa kuatnya BPD dalam ranah politik dan social desa.

### C. Konsep Partisipasi

#### • **Pengertian Partisipasi**

Partisipasi masyarakat adalah ikut sertanya seluruh anggota masyarakat dalam memecahkan permasalahan-permasalahan masyarakat tersebut. Partisipasi masyarakat di bidang pembangunan berarti keikutsertaan seluruh anggota masyarakat dalam memecahkan masalah pembangunan mereka sendiri. Dalam hal ini, masyarakat sendirilah yang aktif memikirkan, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program pembangunan masyarakatnya. Institusi pembangunan hanya sekadar memotivasi dan membimbingnya (Notoatmodjo, 2007).

Mikkelsen dalam Soetomo (2006), mengatakan bahwa pembangunan pada dasarnya merupakan proses perubahan, dan salah satu bentuk perubahan yang diharapkan adalah perubahan sikap dan perilaku. Partisipasi masyarakat yang semakin meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif merupakan salah satu perwujudan dari perubahan sikap dan perilaku tersebut. Ada enam jenis tafsiran mengenai partisipasi masyarakat tersebut antara lain:

1. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek atau program pembangunan tanpa ikut serta dalam mengambil keputusan.
2. Partisipasi adalah usaha membuat masyarakat semakin peka dalam meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan menanggapi proyek-proyek atau program-program pembangunan.
3. Partisipasi adalah proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok terkait mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu.
4. Partisipasi adalah penetapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf dalam melakukan persiapan, pelaksanaan dan monitoring proyek/program agar memperoleh informasi mengenai konteks lokal dan dampak-dampak sosial.
5. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukan sendiri.
6. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan mereka.

Conyer dalam Soetomo (2006), mengemukakan partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat secara sukarela yang didasari oleh determinan dan kesadaran diri masyarakat itu sendiri dalam program pembangunan. Ada lima cara untuk melibatkan keikutsertaan masyarakat yaitu :

1. Survei dan konsultasi lokal untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan.
2. Memanfaatkan petugas lapangan, agar sambil melakukan tugasnya sebagai agen pembaharu juga menyerap berbagai informasi yang dibutuhkan dalam perencanaan.
3. Perencanaan yang bersifat desentralisasi agar lebih memberikan peluang yang semakin besar kepada masyarakat untuk berpartisipasi.
4. Perencanaan melalui pemerintah lokal.
5. Menggunakan strategi pembangunan komunitas (*community development*)

Menurut Slamet (2003), berdasarkan pengertian partisipasi, maka partisipasi dalam pembangunan dapat dibagi menjadi lima jenis :

1. Ikut memberi input proses pembangunan, menerima imbalan atas input tersebut dan ikut menikmati hasilnya.
2. Ikut memberi input dan menikmati hasilnya.
3. Ikut memberi input dan menerima imbalan tanpa ikut menikmati hasil pembangunan secara langsung.
4. Menikmati/memanfaatkan hasil pembangunan tanpa ikut memberi input.
5. Memberi input tanpa menerima imbalan dan tidak menerima hasilnya.

#### • **Peranan Partisipasi Masyarakat**

Menurut Notoatmodjo (2007), di dalam partisipasi setiap anggota masyarakat dituntut suatu kontribusi atau sumbangan. Kontribusi tersebut bukan hanya terbatas pada dana dan finansial saja tetapi dapat berbentuk daya (tenaga) dan ide (pemikiran). Dalam hal ini dapat diwujudkan di dalam 4 M, yakni manpower (tenaga), money (uang), material (benda-benda lain seperti kayu, bambu, beras, batu, dan sebagainya), dan mind (ide atau gagasan).

#### • **Dasar-Dasar Filosofi Partisipasi Masyarakat**

Dalam hubungannya dengan pembangunan, partisipasi masyarakat dapat diarahkan untuk mencukupi kelangkaan tersebut. Dengan kata lain, partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Pelayanan yang diciptakan dengan adanya partisipasi masyarakat didasarkan kepada idealisme (Notoatmodjo, 2007).

- a. *Community felt need*. Apabila pelayanan itu diciptakan oleh masyarakat sendiri, ini berarti bahwa masyarakat itu memerlukan pelayanan tersebut. Sehingga adanya pelayanan pembangunan bukan karena diturunkan dari atas yang belum dirasakan perlunya, tetapi tumbuh dari bawah yang diperlukan masyarakat dan untuk masyarakat.
- b. Organisasi pelayanan pembangunan masyarakat yang berdasarkan partisipasi masyarakat adalah salah satu bentuk pengorganisasian masyarakat. Hal ini berarti bahwa fasilitas Pembangunan itu timbul dari masyarakat sendiri.
- c. Pembangunan tersebut akan dikerjakan oleh masyarakat sendiri. Artinya tenaganya dan penyelenggaraannya akan ditangani oleh anggota masyarakat itu sendiri yang dasarnya sukarela. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa filosofi partisipasi masyarakat dalam pelayanan pembangunan masyarakat adalah terciptanya suatu pelayanan untuk masyarakat, dari masyarakat dan oleh masyarakat.

- ***Pendekatan Partisipasi Masyarakat***

Menurut Club du Sahel dalam Mikkelsen (2003), beberapa pendekatan untuk memajukan partisipasi masyarakat yaitu:

1. Pendekatan pasif, pelatihan dan informasi; yakni pendekatan yang beranggapan bahwa pihak eksternal lebih menguasai pengetahuan, teknologi, keterampilan dan sumber daya. Dengan demikian partisipasi tersebut memberikan komunikasi satu arah, dari atas ke bawah dan hubungan pihak eksternal dan masyarakat bersifat vertikal.
2. Pendekatan partisipasi aktif; yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berinteraksi secara lebih intensif dengan para petugas eksternal, contohnya pelatihan dan kunjungan.
3. Pendekatan partisipasi dengan keterikatan; masyarakat atau individu diberikan kesempatan untuk melakukan pembangunan, dan diberikan pilihan untuk terikat pada sesuatu kegiatan dan bertanggung jawab atas kegiatan tersebut.
4. Pendekatan dengan partisipasi setempat ; yaitu pendekatan dengan mencerminkan kegiatan pembangunan atas dasar keputusan yang diambil oleh masyarakat setempat.

Agar memperbaiki kondisi dan peningkatan taraf hidup masyarakat, maka usaha untuk dapat menggerakkan partisipasi masyarakat :

1. Disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang nyata.
2. Dijadikan stimulasi terhadap masyarakat, yang berfungsi mendorong timbulnya jawaban (*respons*) yang dikehendaki.
3. Dijadikan motivasi terhadap masyarakat, yang berfungsi membangkitkan tingkah laku (*behavior*) yang dikehendaki secara berlanjut (Ndraha,1990).

Berdasarkan hasil penelitian Goldsmith dan Blustain tahun 1980 di Jamaica dalam Ndraha (1990), berkesimpulan bahwa masyarakat tergerak untuk berpartisipasi jika:

1. Partisipasi itu dilakukan melalui organisasi yang sudah dikenal atau yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat.
2. Partisipasi itu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang bersangkutan.
3. Manfaat yang diperoleh melalui partisipasi itu dapat memenuhi kepentingan masyarakat setempat.
4. Dalam proses partisipasi itu terjamin adanya kontrol yang dilakukan oleh masyarakat. Partisipasi masyarakat ternyata berkurang jika mereka tidak atau kurang berperan dalam pengambilan keputusan.

- ***Metode Partisipasi Masyarakat***

Notoatmodjo (2005), menyatakan metode yang dapat dipakai pada partisipasi masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan masyarakat, diperlukan untuk memperoleh simpati masyarakat. Pendekatan ini terutama ditujukan kepada pimpinan masyarakat, baik yang formal maupun informal.
2. Pengorganisasian masyarakat, dan pembentukan panitia (tim).
  - a. Dikoordinasi oleh lurah atau kepala desa.

- b. Tim kerja, yang dibentuk di tiap RT. Anggota tim ini adalah pemuka-pemuka masyarakat RT yang bersangkutan, dan dipimpin oleh ketua RT.
3. Survei diri (*Community self survey*) Tiap tim kerja di RT, melakukan survei di masyarakatnya masing-masing dan diolah serta dipresentasikan kepadaarganya.
4. Perencanaan program Perencanaan dilakukan oleh masyarakat sendiri setelah mendengarkan presentasi survei diri dari tim kerja, serta telah menentukan bersama tentang prioritas masalah yang akan dipecahkan. Dalam merencanakan program ini, perlu diarahkan terbentuknya. Kedua hal ini sangat penting dalam rangka pengembangan partisipasi masyarakat.
5. Training untuk para kader sukarela harus dipimpin oleh tenaga pendamping desa.
6. Rencana evaluasi, dalam menyusun rencana evaluasi perlu ditetapkan kriteria-kriteria keberhasilan suatu program, secara sederhana dan mudah dilakukan oleh masyarakat.

- ***Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat***

Dalam peran mengembangkan dan membina partisipasi masyarakat ada beberapa faktor yang bisa membantu atau mendorong peran tersebut. Faktor-faktor tersebut sebagian kita jumpai di masyarakat dan sebagian di provider sendiri.

1. Faktor-faktor di masyarakat

Konsep partisipasi masyarakat sebenarnya bukan hal baru bagi kita di Indonesia. Dari sejak nenek moyang kita, telah dikenal adanya semangat gotong royong dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di masyarakat. Semangat ini mendorong timbulnya partisipasi masyarakat.

2. Faktor-faktor pendorong di pihak provider

Faktor pendorong terpenting yang ada di pihak provider ialah adanya kesadaran di lingkungan provider, bahwa perilaku merupakan faktor penting dan besar pengaruhnya terhadap derajat pembangunan. Kesadaran ini melandasi pemikiran pentingnya partisipasi masyarakat. Selain itu, keterbatasan sumber daya di pihak provider untuk mengembangkan dan membina partisipasi masyarakat.

Menurut Sastropetro (1988), ada lima unsur penting yang menentukan gagal dan berhasilnya partisipasi, yaitu:

1. Komunikasi yang menumbuhkan pengertian yang efektif atau berhasil.
2. Perubahan sikap pendapat dan tingkah laku yang diakibatkan oleh pengertian yang menumbuhkan kesadaran.
3. Kesadaran yang didasarkan pada perhitungan dan pertimbangan.
4. Kesiadaan melakukan sesuatu yang tumbuh dari dalam lubuk hati sendiri tanpa dipaksa orang lain.
5. Adanya rasa tanggung jawab terhadap kepentingan bersama.

Hadi dalam Dwiyantri (2005), mengemukakan bahwa faktor penghambat untuk meningkatkan partisipasi publik di Indonesia adalah :

1. Faktor sosial, seperti: tingkat pendidikan, pendapatan dan komunikasi
2. Faktor budaya, meliputi: sikap dan perilaku, pengetahuan dan adat istiadat.
3. Faktor politik
4. Faktor birokrasi para pengambil keputusan.

Menurut Mikkelsen (2003), rendahnya partisipasi masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

1. Adanya penolakan secara internal di kalangan anggota masyarakat dan penolakan eksternal terhadap pemerintah.
2. Kurangnya dana.
3. Terbatasnya informasi, pengetahuan atau pendidikan masyarakat, dan
4. Kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Banyak program pembangunan yang kurang memperoleh antusias dan partisipasi masyarakat karena kurangnya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi. Di lain pihak juga sering dirasakan kurangnya informasi yang disampaikan kepada masyarakat mengenai kapan dan dalam bentuk apa mereka dapat atau dituntut untuk berpartisipasi. Pemberian kesempatan berpartisipasi pada masyarakat, harus dilandasi oleh pemahaman bahwa masyarakat setempat layak diberi kesempatan karena

mereka juga punya hak untuk berpartisipasi dan memanfaatkan setiap kesempatan membangun bagi perbaikan mutu hidupnya.

Menurut Margono dalam Mardikanto (2003), tumbuh kembangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu :

1. Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi. Adanya kesempatan yang diberikan, merupakan faktor pendorong tumbuhnya kemauan, dan kemauan akan menentukan kemampuannya. Sebaliknya, adanya kemauan akan mendorong seseorang untuk meningkatkan kemampuan serta memanfaatkan setiap kesempatan.
2. Adanya kemauan untuk berpartisipasi
3. Kemauan untuk berpartisipasi merupakan kunci utama bagi tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat. Kesempatan dan kemampuan yang cukup belum merupakan jaminan bagi tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat, jika mereka sendiri tidak memiliki kemauan untuk membangun.
4. Adanya kemampuan untuk berpartisipasi. Kemampuan untuk berpartisipasi adalah :
  - a. Kemampuan untuk menemukan dan memahami kesempatan-kesempatan untuk membangun, atau pengetahuan tentang peluang untuk membangun (memperbaiki mutu hidupnya).
  - b. Kemampuan untuk melaksanakan pembangunan, yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki.

- **Pengertian Partisipasi Politik**

Banyak ahli memberikan pengertian mengenai konsep partisipasi. Bila dilihat dari asal katanya, kata partisipasi berasal dari kata bahasa Inggris "*participation*" yang berarti pengambilan bagian, pengikutsertaan (John M. Echols & Hasan Shadily, 2000: 419). Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan (I Nyoman Sumaryadi, 2010: 46).

Davis (2000:142) Didalam bukunya beliau menjelaskan bahwa definisi partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional seseorang atau individu dalam situasi kelompok yang mendorong dia untuk berkontribusi terhadap tujuan kelompok dan mempertanggung-jawabkan keterlibatannya.

Echols & Shadily (dalam Soetrisno, 2000: 419) Didalam bukunya beliau menjelaskan bahwa pengertian partisipasi adalah suatu kegiatan untuk membangkitkan perasaan dan di ikut-sertakan atau ambil bagian dalam kegiatan suatu organisasi.

Cohen dan Uphoff yang dikutip oleh Siti Irene Astuti D (2011: 61-63) membedakan partisipasi menjadi empat jenis, yaitu pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan ini antara lain seperti ikut menyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan meliputi menggerakkan sumber daya, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program. Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dalam rencana yang telah digagas sebelumnya baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi dalam pengambilan manfaat tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas dapat dilihat dari output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari presentase keberhasilan program. Keempat, partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan program yang sudah direncanakan sebelumnya. Partisipasi dalam evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang sudah direncanakan sebelumnya. Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah keterlibatan suatu individu atau kelompok dalam pencapaian tujuan dan adanya pembagian kewenangan atau tanggung jawab bersama.

Menurut Basrowi yang dikutip Siti Irene Astuti D (2011: 58), partisipasi masyarakat dilihat dari bentuknya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

- a. Partisipasi fisik, partisipasi fisik adalah partisipasi masyarakat dalam bentuk menyelenggarakan usaha-usaha pendidikan politik.
- b. Partisipasi non fisik, partisipasi non fisik adalah partisipasi keikutsertaan masyarakat dalam menentukan arah Politik.

Pemerintah dalam membuat dan melaksanakan keputusan politik akan menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat. Dasar inilah yang digunakan warga masyarakat agar dapat ikut serta dalam menentukan isu politik. Perilaku yang demikian dalam konteks politik mencakup semua kegiatan sukarela, dimana seorang ikut serta dalam proses pemilihan pemimpin-pemimpin politik dan turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam pembentukan kebijakan umum.

Dalam negara kota di zaman Yunani, orang saling berinteraksi guna mencapai kesejahteraan, kebaikan dalam hidupnya. Aristoteles dalam Basri (2011). Politik yang berkembang di Yunani kala itu dapat ditafsirkan sebagai suatu proses interaksi antara individu dengan individu lainnya demi mencapai kebaikan bersama. Pemikiran mengenai politik pun khususnya di dunia barat banyak dipengaruhi oleh filsuf Yunani Kuno. Filsuf seperti Plato dan Aristoteles menganggap politics sebagai suatu usaha untuk mencapai masyarakat politik (*polity*) yang terbaik. Budiardjo Miriam (2007).

Dengan demikian, politik berkaitan erat dengan proses pembuatan keputusan publik. Penekanan terhadap penggunaan instrumen otoritatif dan koersif dalam pembuatan keputusan publik berkaitan dengan siapa yang berwenang, bagaimana cara menggunakan kewenangan tersebut, dan apa tujuan dari suatu keputusan yang disepakati. Jika ditarik benang merahnya, definisi politik menurut Almond juga tidak lepas dari interaksi dalam masyarakat politik (*polity*) untuk menyepakati siapa yang diberi kewenangan untuk berkuasa dalam pembuatan keputusan publik. Definisi politik juga diberikan oleh ilmuwan politik lainnya, yaitu Andrew Heywood. Menurut Andrew Heywood, politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerja sama. Andrew Heywood dalam Budiardjo Miriam (2007).

Dengan definisi tersebut, Andrew Heywood secara tersirat mengungkap bahwa masyarakat politik (*polity*) dalam proses interaksi pembuatan keputusan publik juga tidak lepas dari konflik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok lainnya. Dengan kata lain, masing-masing kelompok saling mempengaruhi agar suatu keputusan publik yang disepakati sesuai dengan kepentingan kelompok tertentu. Konflik dan kerja sama dalam suatu proses pembuatan keputusan publik adalah satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan sebagai bagian dari proses interaksi antar kepentingan. Aspirasi dan kepentingan setiap kelompok dan individu dalam masyarakat tidak selalu sama, melainkan berbeda bahkan dalam banyak hal bertentangan satu sama lain. Surbakti (1992).

Menurut Budiardjo (2007) partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Dari pengertian mengenai partisipasi politik di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud partisipasi politik adalah keterlibatan individu atau kelompok sebagai warga negara dalam proses politik yang berupa kegiatan yang positif dan dapat juga yang negatif yang bertujuan untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik dalam rangka mempengaruhi kebijakan pemerintah.

- **Bentuk Partisipasi Politik**

Bentuk partisipasi politik yang paling umum dikenal adalah pemungutan suara (*voting*) entah untuk memilih calon wakil rakyat atau untuk memilih kepala negara.

Dalam buku pengantar sosiologi Politik, Michael Rush dan Philip Althoff (2005) mengidentifikasi bentuk-bentuk partisipasi politik sebagai berikut :

- Menduduki jabatan politik atau administrasi;
- Mencari jabatan politik atau administrasi;
- Mencari anggota aktif dalam suatu organisasi politik;
- Menjadi anggota pasif dalam suatu organisasi politik.
- Menjadi anggota aktif dalam suatu organisasi semi politik
- Menjadi anggota pasif dalam suatu organisasi semi politik
- Partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, dsb
- Partisipasi dalam diskusi politik internal
- Partisipasi dalam pemungutan suara.

Sastroatmodjo (2007) juga mengemukakan tentang bentuk-bentuk partisipasi politik berdasarkan jumlah pelakunya yang dikategorikan menjadi dua yaitu partisipasi individual dan partisipasi kolektif. Partisipasi individual dapat berwujud kegiatan seperti menulis surat yang berisi tuntutan atau keluhan

kepada pemerintah. Partisipasi kolektif adalah bahwa kegiatan warga negara secara serentak dimaksudkan untuk mempengaruhi penguasa seperti dalam kegiatan pemilu.

Bentuk-bentuk partisipasi politik yang dikemukakan oleh Almond (Almond, Gabriel A. dan Verba, Sidney 1990) yang terbagi dalam dua bentuk yaitu partisipasi politik konvensional dan partisipasi politik non konvensional. Partisipasi politik konvensional dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pemberian suara dalam kegiatan pemilihan umum merupakan partisipasi politik yang biasa, yang sering kali lebih luas bila dibanding partisipasi politik lain. Harus disadari bahwa kegiatan pemilihan umum merupakan bentuk partisipasi politik kolektif yang besar yang telah membedakannya dari partisipasi politik lainnya. Di negara demokratis pemilihan umum merupakan alat untuk memberikan kesempatan kepada rakyat untuk ikut serta mempengaruhi kebijakan pemerintah.
- b. Diskusi politik adalah bagaimana setiap orang boleh berani mengemukakan pendapatnya secara pribadi, mempertahankan argumentasinya dan juga mampu menerima pendapat orang lain tentang hak dan kewajiban dalam politik.
- c. Kampanye menurut kamus bahasa Indonesia adalah serentak mengadakan gerakan bisik, gerakan dengan jalan menyiarkan kabar angin kampanye. Kampanye politik adalah bentuk komunikasi politik yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang atau organisasi politik dalam waktu tertentu untuk memperoleh dukungan politik dari masyarakat. Pengertian kampanye berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada pasal 1 angka 26 adalah kegiatan Peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program peserta pemilu.
- d. Kampanye merupakan serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan untuk menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu. Jadi pada dasarnya kampanye merupakan hal lumrah yang sering ditemukan. Bahkan dalam beberapa waktu sering kali ditemukan implementasi dari proses kampanye yang tidak sejalan dengan regulasi yang telah disepakati bersama.
- e. Salah satu bentuk partisipasi politik adalah mengikuti kegiatan organisasi politik, yang oleh Almond dikatakan sebagai kegiatan membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan. Bentuk lain partisipasi politik dalam konteks perilaku adalah mencari koneksi. Mencari koneksi merupakan suatu tindakan yang berusaha untuk melakukan pendekatan-pendekatan dengan pejabat-pejabat pemerintah, yang dimaksudkan untuk mencari keuntungan dan kemudahan dalam segala urusan sehingga kepentingan pribadi dapat diperoleh.
- f. Kemampuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan menggunakan sumber daya dan kesempatan (peluang) lain yang tersedia secara optimal.

#### **D. Konsep Pembangunan**

Pada hakekatnya pembangunan adalah proses perubahan yang terus menerus yang merupakan kemajuan dan perbaikan ke arah yang telah ditentukan. "pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa". Pembangunan merupakan suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui Peran yang dilakukan secara terencana (Kartasasmita, 1994)

Menurut Todaro (1997:103) menyatakan bahwa : pembangunan haruslah diarahkan kembali sebagai suatu serangan terhadap kebusukan atau kejahatan dunia sekarang. Kekurangan makanan yang sehat atau bergizi, penyakit, buta aksara, kemunduran-kemunduran, pengangguran dan ketimpangan atau ketidakadilan. Jika diukur dari tingkat pertumbuhan secara keseluruhan, pembangunan telah mencapai sukses yang besar, akan tetapi jika ditinjau dan dikaji dari segi pekerjaan, keadilan dan penghapusan kemiskinan, maka pembangunan itu mengalami kegagalan atau walaupun sukses hanyalah sebagian kecil saja.

Tiap-tiap negara mengejar pembangunan, suatu tujuan bahwa semua orang turut mengambil bagian. Sedangkan kemajuan ekonomi adalah suatu komponen yang esensial dari pembangunan itu, walaupun bukan satu satunya. Hal ini disebabkan pembangunan itu bukanlah semata-mata fenomena ekonomi. Dalam pengertian paling mendasar, pembangunan itu haruslah mencakup masalah-masalah materi dan finansial dalam kehidupan orang. Karena pembangunan harus diselidiki sebagai suatu proses multidimensial yang melibatkan reorganisasi dan reorientasi dari semua sistem ekonomi dan sosial. Pembangunan dapat diartikan sebagai proses memajukan atau memperbaiki suatu keadaan melalui berbagai tahap secara terencana dan berkesinambungan (Conyers dan hill, 2011:12).

Menurut Soetomo (2008), pembangunan sebagai proses perubahan dapat dipahami dan dijelaskan dengan cara yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat dilihat dalam hal sumber atau faktor yang mendorong perubahan tadi, misalnya yang ditempatkan dalam posisi lebih dominan, sumber perubahan internal atau eksternal. Disamping itu, sebagai proses perubahan juga dapat dilihat dari intensitas atau fundamental tidaknya perubahan yang diharapkan, melalui transformasi struktural atautkah tidak. Sebagai proses mobilisasi sumberdaya juga dapat dilihat pandangan dan penjelasan yang berbeda, misalnya pihak yang diberi kewenangan dalam pengelolaannya diantara tiga *stakeholders* pembangunan, yaitu negara, masyarakat, dan swasta. Perbedaan pandangan juga menyangkut level pengelolaan sumber daya tersebut, tingkat lokal, regional, atau nasional. Perspektif yang berbeda juga dapat menyebabkan pemberian perhatian yang berbeda terhadap sumber daya yang ada. Perspektif tertentu lebih memberikan perhatian pada sumber daya alam dan sumber daya manusia, sedangkan perspektif yang lain disamping kedua jenis sumber daya tersebut juga mencoba menggali, mengembangkan dan mendayagunakan sumber daya sosial yang sering disebut juga dengan modal sosial atau energi sosial. Bahkan dalam masing-masing perspektif yang bersikap terhadap sumber daya manusia juga dapat dijumpai pandangan dan perlakuan yang berbeda. Disatu pihak dijumpai perspektif yang melihatnya sebagai sekedar objek yang sama dengan sumber daya alam yang dapat digerakkan dan dimanfaatkan untuk mencapai tujuan pembangunan, dan dilain pihak melihatnya sebagai aktor atau pelaku dari proses pembangunan itu sendiri.

Pengertian pembangunan harus dilihat secara dinamis, bukan dilihat sebagai konsepsi statis yang selama ini sering kita anggap sebagai suatu kesalahan yang wajar. Pembangunan pada dasarnya adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha yang tanpa akhir. "*development is not a static concept it is continuously changing*", artinya juga bisa di katakan bahwa pembangunan itu sebagai "*never ending goal*". Pembangunan ditujukan kepada usaha pembinaan bangsa sehingga semakin kukuh fondasinya dan menjadi negara yang sejajar dengan bangsa lain. (Sondang P. Siagian: 2001).

Menurut Rogers dalam Nasution.Z (2004), pembangunan diartikan sebagai proses yang terjadi pada level atau tingkatan sistem sosial, sedangkan modernisasi menunjuk pada proses yang terjadi pada level individu. Yang paling sering, walaupun kedua pengertian istilah tersebut dibedakan, maka pembangunan dimaksudkan yang terjadi pada bidang ekonomi, atau lebih mencakup seluruh proses analog dan seiring dengan itu, dalam masyarakat secara keseluruhan.

Sebagai suatu istilah teknis, pembangunan berarti membangkitkan masyarakat di negara-negara sedang berkembang dari keadaan kemiskinan, tingkat melek huruf (*literacy rate*) yang rendah, pengangguran, dan ketidakadilan social. Proses pembangunan sebenarnya adalah merupakan suatu perubahan sosial budaya pembangunan. Peran menjadi suatu proses yang dapat bergerak maju atas kekuatan sendiri (*self sustaining process*) tergantung kepada manusia dan struktur sosialnya. Jadi bukan hanya yang di konsepsikan sebagai usaha pemerintah belaka pembangunan tergantung dari suatu "*innerwill*", dan proses emansipasi diri, dan suatu partisipasi kreatif dalam proses pembangunan hanya menjadi mejadi mungkin karena proses pendewasaan (Nawawi, 2009).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan metode kualitatif, dengan mengambil lokasi di di Desa Kema III Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara. Penelitian memfokuskan pada aktifitas atau bentuk partisipasi politik masyarakat desa Kema III dalam pembnagunan desa. Peran pemerintah desa dalam mendorong partisipasi politik masyarakat ini menggunakan pendekatan yang di kemukakan oleh menurut Club du Sahel dalam Mikkelsen (2003), beberapa pendekatan untuk memajukan partisipasi masyarakat yaitu: Pendekatan pasif, Pendekatan partisipasi aktif, Pendekatan partisipasi dengan keterikatan, dan Pendekatan dengan partisipasi setempat. Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Informan dalam penelitian ini adalah: Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa), dan anggota masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisa secara deskriptif, dengan menggunakan teknik triangulasi.

## **UPAYA YANG DILAKUKAN PEMERINTAH DESA UNTUK MENDORONG PARTISIPASI MASYARAKAT**

Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa Kema III, Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakatnya diantaranya adalah dengan melakukan beberapa cara.

### **1. Pendekatan Pasif**

Menurut Club Du Sahel dalam Mikkelsen (2003) pendekatan ini adalah pendekatan dengan cara menyelenggarakan pelatihan dan pemberian informasi dan beranggapan bahwa pihak eksternal lebih menguasai pengetahuan, teknologi, keterampilan dan sumberdaya. Dengan demikian cara pendekatan ini adalah pendekatan yang menggunakan komunikasi satu arah dari atas kebawah dengan demikian hubungan pihak eksternal dan masyarakat bersifat vertikal, berdasarkan hal ini terlihat peran pemerintah desa Kema III dalam mendorong partisipasi politik masyarakat dalam pembangunan di desa Kema III cukup baik hal ini boleh di lihat dari bagaimana pihak pemerintah terus mendorong masyarakat untuk memahami apa yang di maksud dengan politik. Karena di desa Kema III banyak masyarakat belum memahami hak-hak politik mereka, dikarenakan tingkat pendidikan yang minim. Dari data yang ada sumber daya manusia di desa Kema III yang masih boleh dikatakan minim, di mana Jumlah masyarakat yang menempuh pendidikan tinggi hanya sejumlah 31 orang dari 3000-an penduduk desa kema 3, di mana sisanya hanya menamatkan jenjang SLTA/SMA bahkan angka putus sekolah sangat tinggi. Cara yang dilakukan untuk mendorong masyarakat agar mau berpartisipasi diantaranya adalah secara administratif pemerintah desa turut mengagendakan dalam agenda resmi program kerja pemerintah desa untuk mengadakan sosialisasi-sosialisasi dalam bentuk seminar kepada masyarakat desa Kema III secara umum yang bertemakan tentang pendidikan politik, mengingat pengetahuan masyarakat tentang politik masih sangat minim, hal ini tentunya di sebabkan selain sumberdaya manusia dalam hal pendidikan masyarakat masih kurang, salah satu faktor yang mempengaruhinya yaitu profesi atau mata pencaharian masyarakat yang sebagian besar atau 67% bekerja sebagai nelayan. Sebagian besar masyarakat menganggap partisipasi politik tidaklah penting dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu pemerintah selain memberikan seminar-seminar pemerintah juga menyediakan informasi-informasi visual dalam bentuk pamflet-pamflet. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat diharapkan mereka menjadi bisa turut berpartisipasi secara politik dalam membangun desa.

Namun jika di pandang secara lebih detail apa yang di upayakan oleh pihak pemerintah tersebut belum menyentuh ke semua masyarakat karena pola sosialisasi atau pendidikan politik yang masih belum menyentuh seluruh masyarakat bahkan hanya terkesan formalitas belaka. Selain itu pada saat pemilu terakhir 19 April 2019 yang lalu masih banyak masyarakat yang masih terjebak dengan pragmatism politik.

#### **4.3.2 Pendekatan Partisipasi Aktif.**

Pendekatan partisipasi aktif yang di maksud di sini adalah pendekatan yang memberikan kesempatan kepada masyarakat secara umum untuk boleh berinteraksi secara lebih intensif dengan para petugas eksternal, dalam hal ini pelatihan dan kunjungan-kunjungan dari pihak eksternal itu sendiri. Dalam hal ini peran pemerintah dalam memberikan ruang kepada anggota masyarakat untuk terlibat dalam kunjungan-kunjungan yang di lakukan oleh pihak-pihak terkait yang mensosialisasikan hak-hak dalam mengambil bagian dalam berpartisipasi sudah cukup baik. Contohnya, pemerintah desa menjalin kerja sama dengan mahasiswa kuliah kerja nyata terpadu Universitas Sam Ratulangi pada tahun 2016 untuk turun langsung ke masyarakat menjangkau dari komunitas-komunitas masyarakat yang ada di desa kema III untuk menyampaikan kepada masyarakat apa yang menjadi hak politik setiap masyarakat untuk kemudian itu menjadi suatu bentuk partisipasi masyarakat terhadap pembangunan di desa Kema III. Hal ini kemudian berdampak kepada partisipasi politik masyarakat yang telah bisa bersuara hingga melakukan loby-loby langsung dengan pemangku kepentingan di antaranya calon anggota legislatif dan pegiat politik lainnya baik tim sukses maupun pimpinan partai politik untuk kemudian terjadi kesepakatan-kesepakatan ketika masyarakat mendukung calon yang ada dan ketika calon yang di maksud terpilih sehingga boleh memperjuangkan apa yang telah menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat yang bermuara terhadap pembangunan desa Kema III baik pembangunan fisik maupun pembangunan secara masyarakat. Jadi dalam hal ini pemerintah desa membuka peluang seluas-luasnya masyarakat untuk menyampaikan langsung kepada pihak eksternal terkait dengan apa yang menjadi keinginan mereka

Namun pendekatan yang di lakukan oleh pihak pemerintah desa Kema III ini belum menyentuh kepentingan masyarakat secara menyeluruh dan merata, hal ini masih di jumpai keluhan dari pihak masyarakat desa Kema III yang beranggapan bahwa pihak pemerintah desa Kema III, masih belum terlalu transparan dan bahkan hanya melibatkan pihak-pihak yang itu-itu saja.

#### **4.3.3 Pendekatan Partisipasi dengan Keterikatan.**

Pendekatan partisipasi dengan keterikatan yang di maksud di sini adalah pendekatan yang di lakukan dengan cara masyarakat atau individu di berikan kesempatan untuk melakukan pembangunan, dan di berikan pilihan untuk terikat pada suatu kegiatan dan bertanggung jawab atas kegiatan tersebut.

Berangkat dari hal ini yang di hubungkan dengan partisipasi politik masyarakat maka terlihat pemerintah cukup baik dengan memberikan posisi-posisi formal kepada tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh atau relasi yang luas terhadap stake holders di berbagai tingkatan atau jenjang pemerintahan, maka di harapkan partisipasi politik sebagai bagian dari masyarakat. Hal ini sudah terbukti dengan adanya pembangunan-pembangunan yang di lakukan di desa Kema III yang di hasilkan melalui lobi-lobi politik yang di lakukan oleh para tokoh masyarakat yang di berikan posisi-posisi formal misalnya panitia pembangunan gedung sekolah yang ada di desa kema III.

#### **4.3.4 Pendekatan dengan Partisipasi Setempat.**

Pendekatan dengan partisipasi setempat yang di maksud di sini yaitu pendekatan yang mencerminkan atau menggambarkan kegiatan partisipasi politik untuk pembangunan atas dasar keputusan yang di ambil oleh masyarakat yang ada di desa Kema III. Dari factor ini terlihat peran pemerintah sudah cukup maksimal dalam membuka seluas-luasnya ruang bagi masyarakat dan stake holders atau pemangku kepentingan yang ada di desa Kema III untuk turut merumuskan atau merencanakan kebijakan hingga memutuskan secara bersama-sama hal ini bertujuan agar rasa tanggung jawab untuk berpartisipasi secara politik dari masyarakat dan semua elemen yang berada di desa Kema III boleh lebih terdorong untuk meningkat baik secara kuantitas maupun secara kualitas.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa Kema III Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat, diantaranya: Dalam bentuk pendekatan pasif yang di jabarkan dalam program-program pemerintah desa dengan memberikan pelatihan tentang politik, dalam bentuk pendekatan partisipasi dengan keterikatan dimana pemerintah memberikan kepercayaan kepada masyarakat yang memiliki jaringan dan di tokohkan di desa Kema III untuk menduduki posisi-posisi strategis dalam lembaga bentukan desa maupun sebagai panitia-panitia dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan partisipasi politik dalam pembangunan di desa Kema III, dan dalam bentuk membuka peluang seluas-luasnya masyarakat untuk merencanakan dan merumuskan keputusan apa yang akan di ambil berkaitan dengan partisipasi politik demi kemajuan pembangunan yang ada di desa Kema III, sudah dapat dikatakan berhasil dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Namun masih perlu ditingkatkan dan dapat lebih transparan dalam melakukan kegiatan politik agar memperoleh kepercayaan dari masyarakat, sehingga masyarakat juga merasa bertanggung jawab akan desanya dan sama-sama berkontribusi dengan pemerintah desa dalam pembangunan desa.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Almond Gabriel A. dan Verba Sidney 1990. *Budaya Politik Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*. Penerjemah Drs. Sahat Simamora. Penerbit Bumi Aksara – Jakarta.
- Basri Seta. 2011. *Pengantar Ilmu Politik*. Yogyakarta: Indie Book Corner.
- Budiardjo Miriam. 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Conyers D. (1994). *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Davis, 2000, *Perilaku Dalam Organisasi*, Edisi Ketujuh, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Dwiyanti, Lili. 2005. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Kota Banjarmasin. Tesis Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Program Pasca Sarjana Universitas Lambung Mangkurat, Banjar Baru.*

- I Nyoman, Sumaryadi, 2010, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Penerbit Citra Utama.
- John M. Echols dan Hassan Shadily. 2000. *Kamus Inggris Indonesia An English Indonesia Dictionary*. Jakarta : PT. Gramedia.
- Kartasasmita G. 1994. *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*. Jakarta : PT Gelora Aksara Pratama
- Maria E. S, *Pemerintahan Desa dan Implementasinya*, Jakarta: Erlangga, 2006.
- Mardikanto,T. 2003. *Redefinisi dan Revitalisasi Penyuluhan Pembangunan ,dalam Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan* (Ed. Ida Yustina dan Adjat Sudradjat), IPB Press – Bogor
- Michael Rush dan Philip Althoff .2005. *Pengantar sosiologi Politik*, Jakarta: PT Grasindo.
- Mikkelsen B. 2001. *Methods for Development Work and Research*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Miftah, Thoha. 1997, *Kepemimpinan Dalam Manajemen Suatu Pendekatan Perilaku*, Kaya Safrindo Pustaka, Jakarta.
- Moleong. 1994. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosakarya.
- Nawawi. 1995. *Instrument Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta.UGM
- Nasution, Z. 2004. *Komunikasi Pembangunan Pengenalan Teori dan Penerapannya*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Nawawi, (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis Yang Kompetitif*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Nurmayani. 2009. *Hukum Administrasi Daerah*. Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung.
- Ndraha,T, 1990. *Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Notoatmodjo, S. 2007. *Promosi dan Ilmu Perilaku*. Jakarta : Rineka Cipta
- Rudi, S. *Media Pembelajaran*, Bandung: CV Wacanan Prima,2008
- Slamet, M. 1985. *Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pedesaan*. Interaksi No.1, Jakarta.
- Sastroatmodjo, 2007, *Perilaku Politik*. Penerbit IKIP Semarang Press – Jakarta.
- Sastropetro, S. 1988. *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Penerbit Alumnii.
- Siti Irene Astuti Dwiningrum. (2011). *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soetopo, 1999. *Pelayanan Prima*, Jakarta, STIA LAN Presss.
- Sondang P. Siagian.1994. *Teori Dan Praktek Kepemimpinan*. Jakarta: Penerbit Rhineka Cipta. H.192
- Sondang P. S, 2001, *"Manajemen Sumber Daya Manusia"*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Soetomo, 2008. *Masalah Sosial dan Peran Pemecahannya*. Yogyakarta Pustaka Pelajar.
- Soerjono Soekanto, 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali Pers,
- Sugiyono. 2005, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta
- Sutrisno. 2000. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Surbakti Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Grasindo.
- Todaro, Michael P. 1997. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*. Edisi Ke Enam, Alih Bahasa : Drs. Haris Munandar, M. A., Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama.
- Umi Narimawati. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif : Teori dan Aplikasi*, Jakarta : Agung Media.

#### **SUMBER LAIN**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

UU Nomor 1 Tahun 2015. *Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*

Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri dalam Negeri No. 47 Tahun 2016 Tentang Adminstrasi Desa.